BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Objek penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun subjek penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalimantan Selatan yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran penting dalam hal mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian serta dalam hal melakukan analisis masalah yang diteliti. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian tersebut maka diperlukan suatu metode penelitian yang relevan dan tepat.

Menurut Sugiyono (2018:14) pengertian metode penelitian adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme (mengandalkan empirisme) yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak (random), pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian objektif, dan analisis data bersifat jumlah atau banyaknya (kuantitatif) atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2.1 Jenis Penelitian yang di gunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen dan wadah publikasi informasi lainnya oleh perusahaan terkait. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai alasan, antara lain mudah didapat, penggunaan data anggaran yang telah diaudit oleh pemeriksa independen sehingga data terpercaya keabsahannya, serta biayanya yang lebih murah. Sumber data diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas pemeriksaan terhadap 14 Entitas yang dijadikan sampel pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023..

3.2.2 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial. Adapun variabel yang akan menjadi fokus pada penelitian ini yaitu :

1. Variabel Independen

   Menurut Sugiyono (2019:69) variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau penyebab timbul atau berubahnya variabel dependen. Yang merupakan variable independen adalah :

   a. Sistem Pengendalian Internal
   b. Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel bebas Sugiyono (2019:69). Variabel dependen merupakan variabel yang bergantung dengan variabel lainya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Opini BPK Atas LKPD.

Tabel 3.1

Operasional Variabel Penelitian

Konsep Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
Sistem Pengendalian Internal	Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan. (Sumber : PP nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)	1. Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	a. Jumlah Kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.	Rasio
			b. Jumlah Kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan.	Rasio
			c. Jumlah Kasus SIA dan pelaporan tidak memadai	Rasio
		2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	a. Jumlah Kasus perencanaan kegiatan tidak memadai.	Rasio
			b. Jumlah Kasus pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja.	Rasio
			c. Jumlah Kasus penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan belanja	Rasio
			d. Jumlah Kasus permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja	Rasio

Konsep Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
		3. Kelemahan struktur pengendalian intern. Sumber : (IHPS BPK tahun 2016)	a. Jumlah Kasus SOP belum disusun atau tidak lengkap.	Rasio
			b. Jumlah Kasus SOP belum berjalan optimal.	Rasio
			c. Jumlah Kasus satuan pengawas intern yang tidak memadai atau tidak optimal.	Rasio
Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yaitu temuan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang- undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan terkait lainnya. (Sumber : Keputusan BPK RI NOMOR 1/K/I-XIII.2/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)	ketidakpatuhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan : 1. Kerugian daerah	a. Jumlah Kasus kurangnya volume pekerjaanatau barang.	Rasio
			b. Jumlah Kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.	Rasio
			c. Jumlah Kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan atau barang.	Rasio
			d. Jumlah Kasus biaya perjanjian dinas ganda atau melebihistandard yang ditetapkan.	Rasio
		2. Potensial Kerugian	a Jumlah Kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya.	Rasio
			b. Jumlah Kasus aset berupa: tanah, kendaraan dana aset lainnya dikuasai pihak lain.	Rasio
			c. Jumlah Kasus aset berupa: mesin peralatan danaset lainnya tidak diketahui keberadaannya	Rasio

Konsep Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
			d. Jumlah Kasus piutang/ pinjaman danabergulir yang berpotensi tidak tertagih.	Rasio
		3. Kekurangan Penerimaan	a. Jumlah Kasus denda keterlambatan Rasio 76 belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diteri ma/dise tor ke kas negara/daerah.	Rasio
			b. Jumlah Kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan).	Rasio
			c. Jumlah Kasus permasalahan kekurangan penerimaan lainnya.	Rasio
		4. Temuan Administrasi	a. Jumlah Kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik Negara.	Rasio
			b. Jumlah Kasusbukti pertanggung jawaban tidak lengkap/valid lainnya.	Rasio
			c. Jumlah Kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan.	Rasio
			d. Jumlah Kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu.	Rasio
			e. Jumlah Kasus penyetoran penerimaan negara terlambat.	Rasio

Konsep Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
			f. Jumlah Kasus penyimpangan administrasi lainnya.	Rasio
Opini Atas \\ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. (Sumber : UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)	Jenis-jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa.	a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) *Unqualified opinion* (Score 4)	Ordinal
			b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified opinion*) atau biasa disingkat WDP (Score 3)	Ordinal
			c. Opini Tidak Wajar (*Adversed opinion*) biasa disingkat TW (Score 2)	Ordinal
			d. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of opinion*) biasa disingkat TMP (Score 1) Sumber: (UU No. 15 Tahun 2004)	Ordinal

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat dari pihak lain (2019:69). Dalam Penelitian ini penulis memperoleh data berupa laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2013-2023 yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan.

3.3.2 Populasi Sasaran

Populasi sasaran adalah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalimantan Selatan yang laporan keuangan pemerintah daerah nya menjadi objek pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan pada tahun 2013-2023. tahun pemeriksaan ini dipilih karena merupakan tahun pemeriksaan terbaru yang datanya telah tersedia sehingga dapat diperoleh oleh peneliti.

3.3.3 Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019:127). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan menggunakan teknik *nonprobability sampling* yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi dipilih menjadi sampel. Teknik *nonprobability sampling* yang digunakan yakni *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2019:133). Oleh karna itu ada beberapa entitas yang akan dipilih sebagai sample

yakni sebagai berikut :

1. Kota Banjarmasin
2. Kota Banjarbaru
3. Kabupaten Kotabaru
4. Kabupaten Tanah Bumbu
5. Kabupaten Tanah Laut
6. Kabupaten Barito Kuala
7. Kabupaten Banjar
8. Kabupaten Tapin
9. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
11. Kabupaten Hulu Sungai Utara
12. Kabupaten Balangan
13. Kabupaten Tabalong

3.3.4 Model Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:72), Model penelitian atau paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan.

Model di dalam penelitian ini adalah paradigma sederhana berurutan, yaitu hubungan antara variabel Sistem Pengendalian Internal (X_1), Kepatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (X_2) dan Opini Badan Pemeriksa

Keuangan Atas LKPD (Y). Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam rangka pengujian hipotesis , maka model penelitian adalah sebagai berikut:

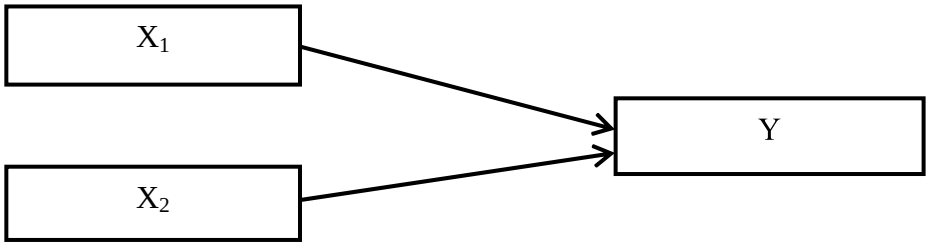

X_1 = Sistem Pengendalian Internal

X_2 = Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Y = Opini BPK Atas LKPD

Gambar 3. 1
Hubungan Struktural Antara Variabel X1, X2 dan Y

3.4 Teknis Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2020:206) adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain sudah terkumpul. Kegiatan analisis data adalah menglompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis data digunakan sebagai upaya untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, merubah karakteristik data agar mudah dipahami serta untuk menjawab masalah yang berkenaan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis regresi data panel dengan bantuan software E-*Views* 12. Analisis data dilakukan untuk memperoleh kesimpulan mengenai pengaruh dan hubungan antara variabel independen yakni SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap variabel dependen yakni Opini BPK Atas LKPD. Data yang diperoleh akan diuji melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan untuk melakukan pengujian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Kurtosis dan skewness merupakan ukuran untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal 40 atau tidak (Ghozali. 2011). Data yang dianalisis adalah adanya kelemahan sistem pengendalian internal, adanya ketidakpatuhan atas peraturan perundangundangan,besaran anggaran, serta opini tahun sebelumnya

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel-variabel kontrol atau korelasi antarvariabel kontrol dalam model regresi. Dalam suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas dengan variabel kontrol atau antarvariabel kontrol. Jika variabel bebas dan variabel kontrol atau antarvariabel kontrol saling berkorelasi,variabel-variabel tersebut dapat dikatakan tidak ortogonal. Variabel

tidak ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi dengan sesama variabel bebas lain dengan nilai tidak sama dengan nol (Ghozali, 2011). Selain itu, jika ada korelasi antara variabel bebas dengan variabel-variabel kontrol atau antar variabel kontrol, dikhawatirkan akan muncul bias pada hasil penelitian.

B. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dalam model regresi antara residual satu dengan yang lain. Menurut Ghozali (2013:139), suatu model regresi dikatakan baik jika modelnya homokedastisitas, yakni tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya untuk mengetahui apakah pola variabel error mengandung heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Jika nilai pada probabilitas p-value atau signifikansi ≥ 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3 Analisis Regresi Data Panel

Menurut Basuki & Prawoto (2017:276) regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu (time series) dengan data silang (cross section). Data time series adalah data yang dikumpulkan dalam kurun waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data cross section adalah data yang dikumpulkan satu waktu dari sampel.

Model regresi panel dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$Yit = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + eit$

Keterangan:

Yit = Variabel Terikat atau dependen (Opini BPK Atas LKPD)

α = Konstanta

β1 – β2 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X1it = Variabel Bebas atau independen (SPI)

X2it = Variabel Bebas atau independen (Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan)

i = Entitas

t = Periode ke-i

e = Error term

3.4.3.1 Teknik Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1. *Common Efect Model*

Pendekatan model ini merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2. *Fixed Effect Model*

Pendekatan model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan antar perusahaan. Bisa juga terjadi perbedaan intersepnya karena perbedaan budaya kerja, manajerial dan intersep. Namun slopnya sama antar perusahaan.

Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

3. *Random Effect Model*

Pendekatan pada model ini dapat mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* terdapat perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* pada masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* adalah untuk menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini disebut juga dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

3.4.3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Menurut Basuki & Prawoto (2017:277) untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:

1. Uji Chow

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis yang dibentuk dalam uji chow adalah sebagai berikut:

H0 : model *common effect* lebih baik dibandingkan model *fixed effect.*

H1 : model *fixed effect* lebih baik dibandingkan model *common effect.*

Dalam uji chow, H0 dapat diterima apabila p-value > α (0,05). Sebaliknya apabila p-value < α (0,05) maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti model yang lebih baik digunakan adalah *fixed effect model*.

2. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistikuntuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan.

Hipotesis yang dibentuk dalam uji chow adalah sebagai berikut:

H0 : model *random effect* lebih baik dibandingkan model *fixed effect.*

H1 : model *fixed effect* lebih baik dibandingkan model *random effect.*

Hasil uji dapat dilihat dari probabilitas *cross section random*, jika nilainya > 0,05 maka H0 diterima maka model yang dipilih adalah *random effect model*. Tetapi jika nilainya < 0,05 maka H0 ditolak maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik daripada metode *common effect* digunakan uji lagrange multiplier

Uji ini menggunakan metode *Breusch-Pagan* dengan melihat *P-Value*. Jika *P-Value Breusch-Pagan* < 0,05, maka model yang tepat adalah *random effect*, sedangkan jika *P-Value* > 0,05, maka model yang tepat adalah *common effect*

3.4.3.3 Analisis Koefisiensi Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2016) rumus yang digunakan untuk analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$Kd = r^2 \times 100\%$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi dikuadratkan

Kriteria untuk koefisien determinasi, yakni:

1. Jika KD mendekati nol, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen rendah

Jika KD mendekati satu, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tinggi.

3.4.3.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Hipotesis Operasional

   a. Pengujian Secara Parsial

H_{01} : $\beta YX_1 = 0$ SPI secara parsial tidak berpengaruh terhadap Opini BPK Atas LKPD

Ha_1 : $\beta YX_1 > 0$ SPI secara parsial berpengaruh positif terhadap Opini BPK Atas LKPD

H_{02} : $\beta YX_2 = 0$ Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Opini BPK Atas LKPD

Ha_2 : $\beta YX_2 > 0$ Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Opini BPK Atas LKPD

   b. Pengujian Secara Bersama-sama

H_0 : $\beta YX_1 : \beta YX_2 = 0$ SPI dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Opini BPK Atas LKPD

$H_1 : \beta YX_1 : \beta YX_2 \neq 0$ SPI dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Opini BPK Atas LKPD

2. Penetapan Tingkat Keyakinan

Dalam penelitian ini ditentukan tingkat keyakinan sebesar 95% dengan tingkat kesalahan yang ditolerir atau alpha (α) sebesar 5%. Penentuan alpha merujuk pada kelaziman yang digunakan secara umum dalam penelitian yang dapat digunakan sebagai kriteria dalam pengujian signifikansi hipotesis penelitian.

3. Penetapan Signifikansi

a. Secara Parsial

Untuk menguji signifikansi secara parsial digunakan uji t, dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-k-1}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t: Uji t

r: Korelasi parsial yang ditentukan

n: Jumlah sampel

k: Jumlah variabel independen

Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

H0: βi = 0, maka tidak ada pengaruh

Ha: βi ≠ 0, maka terdapat pengaruh

b. Secara Simultan

Untuk menguji signifikansi secara bersama-sama digunakan uji F, dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R\ 2/k}{(1 - R2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota data atau kasus

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H0: β1 = β2 = 0: SPI dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini BPK Atas LKPD

Ha: β1 ≠ β2 ≠ 0: SPI dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini BPK Atas LKPD

4. Kaidah Keputusan

a. Secara Parsial

H_0 ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai prob > 0,05

H_0 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai prob < 0,05

b. Secara Simultan

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai sig < α

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai sig > α

5. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis akan menganalisis secara kuantitatif dengan pengujian seperti tahapan di atas. Dari hasil pengujian akan ditarik kesimpulan yaitu mengenai hipotesis yang ditetapkan tersebut dapat diterima atau ditolak.